

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang kuat, salah satu hal yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah melalui UMKM. UMKM memiliki karakteristik yang unik karena jumlahnya yang mendominasi dalam struktur perekonomian Indonesia, dan juga jumlahnya yang selalu bertambah. Keragaman UMKM tersebar luas di Indonesia, demikian pula Kota Semarang yang merupakan ibukota provinsi Jawa Tengah. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan atau organisasi yang telah memenuhi kriteria usaha mikro. Contoh usaha UMKM adalah pedagang asongan, warung, toko kelontong, warung makan, pedagang makanan skala rumah, pedagang kaki lima, penjual keliling, usaha cuci motor, dan masih banyak lagi. Di negara Indonesia, usaha ini memiliki peran penting dalam perekonomian negara ini karena sektor UMKM adalah penyumbang terbesar bagi Produk Domestik Bruto (PDB), paling banyak menyerap tenaga kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan.

Pentingnya peranan industri kecil dalam mengembangkan perekonomian nasional ditunjukkan dengan ditetapkannya Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Dalam Undang-Undang ini diatur bahwa pemberdayaan UMKM perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan

iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan yang seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi usaha dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Selanjutnya diikuti dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Inti dari peraturan ini adalah adanya persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemoho, tata cara mengajukan permohonan izin usaha dan pembebasan biaya perizinan. Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku UMKM tanpa dipungut biaya. Layanan ini meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, penyusunan hukum, dan pendampingan di luar pengadilan.

Tabel 1. 1

**Kriteria UMKM Menurut Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2008 Dan Badan Pusat Statistik**

No.	Uraian.	Kriteria	
		ASSET	OMZET
1.	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2.	Usaha Kecil	>50 Juta- 500 Juta	>300 Juta-2,5 Miliar
3.	Usaha Menengah	>500 Juta- 10 Miliar	>2,5 Miliar-50 Miliar

Sumber : Kementrian Koperasi dan UKM

Dalam Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2008, UMKM dikategorikan berdasarkan tiga aspek utama, yaitu jumlah kekayaan bersih, hasil

penjualan tahunan, dan kepemilikan usaha. Berdasarkan kriteria tersebut, UMKM dibagi menjadi tiga jenis usaha, yaitu **Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.**

A. Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) **Kekayaan bersih:** Maksimal Rp50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).
- b) **Hasil penjualan tahunan:** Maksimal Rp300 juta.

Usaha Mikro biasanya dijalankan oleh individu atau keluarga dengan modal yang terbatas dan lingkup operasional yang kecil. Contoh usaha mikro meliputi warung kelontong, pedagang kaki lima, pengrajin rumahan, serta usaha kuliner kecil seperti warung makan dan katering rumahan.

B. Usaha Kecil

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan besar. Kriteria usaha kecil menurut UU No. 20 Tahun 2008 adalah:

- a) **Kekayaan bersih:** Antara Rp50 juta hingga Rp500 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).
- b) **Hasil penjualan tahunan:** Antara Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar.

Usaha Kecil memiliki struktur yang lebih formal dibanding Usaha Mikro, sering kali sudah berbadan hukum seperti CV atau firma. Contoh usaha kecil meliputi toko ritel menengah, bengkel kendaraan, restoran kecil, industri rumah tangga, serta jasa profesional seperti salon kecantikan dan

penyewaan alat berat.

C. Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak atau cabang dari perusahaan besar. Kriteria usaha menengah menurut UU No. 20 Tahun 2008 adalah:

- a) **Kekayaan bersih:** Antara Rp500 juta hingga Rp10 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).
- b) **Hasil penjualan tahunan:** Antara Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar.

Usaha Menengah memiliki tingkat operasional yang lebih besar dibandingkan Usaha Kecil, dengan jumlah tenaga kerja lebih banyak dan biasanya sudah memiliki sistem manajemen yang lebih terstruktur. Contoh usaha menengah meliputi pabrik skala menengah, restoran waralaba lokal, perusahaan kontraktor, serta industri pengolahan hasil pertanian.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai kegiatan ekonomi masyarakat pada skala kecil yang perlu dilindungi dan dicegah dari persaingan yang tidak sehat. Hal tersebut mengakibatkan munculnya bisnis UMKM dari skala rumahan hingga skala besar. Berdasarkan data yang diambil dari tahun 2021 hingga awal tahun 2022 ada 3 (tiga) jenis usaha yang termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yaitu :

- A. **Usaha Kuliner.** Salah satu bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang paling banyak diminati para pengusaha bahkan hingga kalangan muda sekalipun. Contoh makanan yang dijual seperti seblak, mie ayam hingga lauk pauk khas nusantara, dan

sebagainya.

Berdasarkan dari data yang di ambil di Dinas Koperasi dan UMKM, jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bidang kuliner terdiri dari 8. 712 anggota di Kota Semarang.

B. **Usaha Fashion.** Usaha Fashion berkembang mengikuti trend atau zamannya. Pakaian merupakan barang yang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga bisnis jual beli pakaian selalu ramai di datangi oleh para pembeli. Contoh barang yang dijual juga bermacam-macam. Seperti tas, pakaian, kerudung hingga sepatu. Umumnya, mereka tidak memproduksi secara langsung. Berdasarkan data yang diambil dari Dinas Koperasi dan UMKM, jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bidang fashion terdiri dari 7. 066 anggota di Kota Semarang.

C. **Usaha Otomotif.** Meskipun terlihat sulit, saat ini sudah banyak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang merambah ke dunia otomotif. Tidak hanya mengenai mesin-mesin, usaha yang banyak dirintis UMKM bidang ini seperti bengkel, rental mobil dan motor, tempat pencucian motor dan mobil, hingga toko tempat menjual barang-barang yang dibutuhkan untuk kendaraan. Berdasarkan data yang diambil dari Dinas Koperasi dan UMKM, jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bidang fashion terdiri dari 2. 681 anggota di Kota Semarang. Berdasarkan dari data yang di ambil di Dinas Koperasi dan UMKM, jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bidang kuliner terdiri dari 8.712 anggota di Kota Semarang.

Tabel 1. 2.**Jumlah Data UMKM Kota Semarang Tahun 2022**

NO.	KECAMATAN	PELAKU UMKM	SKALA MIKRO	SKALA KECIL	SKALA MENENGAH
1.	Semarang Barat	2612	578	3	0
2.	Semarang Timur	1163	203	3	0
3.	Semarang Tengah	966	390	4	0
4.	Banyumanik	1878	668	10	0
5.	Candisari	1049	377	2	0
6.	Gajahmungkur	492	290	0	0
7.	Gayamsari	1588	344	0	0
8.	Genuk	3169	206	1	0
9.	Gunungpati	2166	161	3	0
10.	Mijen	1035	355	2	0
11.	Ngaliyan	3286	721	6	0
12.	Pedurungan	1290	717	5	0
13.	Semarang Selatan	1916	332	0	0
14.	Semarang Utara	3048	1067	5	0
15.	Tembalang	3477	1153	5	2
16.	Tugu	617	120	0	0
17.	Luar Kota	116	0	0	0
	TOTAL	29868	7682	49	2

Sumber : <https://dataumkm.semarangkota.go.id/web/dataumkm>

Selain perkembangannya yang pesat, UMKM berbasis rumah juga bisa dengan mudahnya beradaptasi dan menyesuaikan dengan kebutuhan pasar yang terus-menerus berubah seiring dengan berjalannya waktu, hal ini membuat UMKM tidak rentan terhadap perubahan eksternal (Wijoyo & Widyanti, 2020). Salah satu UMKM terbanyak di Kota Semarang adalah di Kecamatan Tembalang. Dari data yang diperoleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, Kecamatan Tembalang memperoleh jumlah UMKM sebanyak 3.477 usaha, 1.153 skala mikro, 5 skala kecil, dan 2 skala menengah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kepadatan penduduk di Kecamatan Tembalang yang kian hari kian menambah

membuat pelaku usaha tertarik untuk membuka usaha di daerah Tembalang. Hendrar Prihadi selaku Walikota Kota Semarang tahun 2022 mengatakan bahwa jumlah UMKM di Tembalang merupakan UMKM terbanyak karena daerah dipengaruhi oleh faktor Pendidikan yang tinggi.

Data yang diperoleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang tahun 2022 memiliki jumlah UMKM sebanyak 29.868 pelaku usaha. Tidak hanya itu, seiring dengan berkembangnya kawasan Tembalang sebagai daerah Pendidikan, banyak perumahan baru dibangun yang memperluas basis konsumen untuk UMKM di daerah ini. Dari data yang diperoleh lewat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, daerah Tembalang memiliki UMKM berbasis kuliner sejumlah kurang lebih 700 pelaku usaha yang bekerja dirumahan, data ini juga masih kurang spesifik karena bertambahnya pelaku usaha yang terus bertambah kian waktu. Biaya hidup dan biaya sewa tempat usaha di Tembalang juga relatif lebih terjangkau dibandingkan dengan pusat kota, yang membuat daerah ini ideal untuk mendirikan usaha baru. Hal ini menarik wirausahawan dan pelaku UMKM untuk memulai bisnis di Kota Semarang. Tembalang juga merupakan salah satu daerah yang terus berkembang pesat, baik dari segi infrastruktur maupun ekonomi.

Tidak hanya di Tembalang, daerah Semarang Selatan memiliki jumlah UMKM sebanyak 1.916 pelaku usaha, dan 332 skala mikro pada tahun 2022. Meskipun jumlah usahanya tidak sebanyak daerah yang lain seperti Kecamatan Tembalang dan Kecamatan Ngaliyan, akan tetapi di daerah Semarang Selatan terutama di sepanjang Jalan Pandanaran

memiliki ciri khas tersendiri yaitu disana banyak sekali makanan khas asli Kota Semarang yang dapat menjadi daya tarik Kota Semarang untuk wisatawan agar berkunjung ke Semarang dan mencicipi makanan khas Kota Semarang. Daerah Semarang Selatan menjadi salah satu kawasan yang banyak menawarkan oleh-oleh khas Kota Semarang karena faktor strategis dan ekonomi yang mendukung pusat oleh-oleh di wilayah ini.

Daerah Semarang Selatan, dengan jumlah pelaku UMKM berbasis kuliner yang cukup banyak dibandingkan dengan daerah lain dapat membantu pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang mengutip bahwa daerah Semarang Selatan merupakan daerah Kota Semarang yang diwajibkan untuk wisatawan mengunjungi daerah tersebut untuk langsung membeli Oleh-Oleh Kota Semarang yang bisa dijumpai salah satunya Lumpia dan Bandeng Presto. Salah satu tempat pusat Oleh-Oleh Kota Semarang yang cukup terkenal yaitu Bandeng Juwana Elrina. Di pusat Oleh-Oleh tersebut, terjual bandeng yang berduri lunak yang bisa dimakan sehingga wisatawan tidak perlu memisahkan duri dari ikan bandeng tersebut.

Daerah Semarang Selatan terutama di sepanjang jalan Pandanaran juga terbilang memiliki omzet tertinggi di Kota Semarang (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro) hal ini dikarenakan banyaknya pedagang kaki lima yang menjual makanan ciri khas Kota Semarang dan banyaknya pusat Oleh-Oleh yang ada di daerah tersebut membuat omzet yang di raih daerah Semarang Selatan meningkat. Hal ini juga didukung oleh letak strategis yang berdekatan dengan Pemerintah sehingga membuat daerah Semarang

Selatan sering secara langsung mendapatkan dukungan dari pemerintah langsung. bandeng yang berduri lunak yang bisa dimakan sehingga wisatawan tidak perlu memisahkan duri dari ikan bandeng tersebut. Di Semarang Selatan terutama di sepanjang jalan Pandanaran juga terbilang memiliki omzet tertinggi di Kota Semarang (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro) hal ini dikarenakan banyaknya pedagang kaki lima yang menjual makanan ciri khas Kota Semarang dan banyaknya pusat Oleh-Oleh yang ada di daerah tersebut membuat omzet yang di raih daerah Semarang Selatan meningkat. Hal ini juga didukung oleh letak strategis yang berdekatan dengan Pemerintah sehingga membuat daerah Semarang Selatan sering secara langsung mendapatkan dukungan dari pemerintah langsung.

Besarnya potensi pengembangan UMKM berbasis rumah dikembangkan di lingkungan pemukiman Kota Semarang tidak terlepas dari kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam mendukung tujuan pembangunan ekonomi. Seperti yang dijabarkan di dalam Propeda Kota Semarang pembangunan bidang ekonomi yang berkelanjutan akan ditekankan untuk penanggulangan permasalahan yaitu lemahnya daya saing produk-produk lokal, lemahnya akses pasar baik regional dan internasional serta terbatasnya jaringan pasar, ketergantungan terhadap bahan baku import, industri-industri kecil dan menengah belum mempunyai standar baku mutu yang dipersyaratkan oleh pasar internasional, lemahnya akses ke lembaga pembiayaan, sistem distribusi yang terlalu panjang.

Tabel 1.3

Jumlah Data UMKM Berbasis Rumah di Kota Semarang 2022

NO	Kecamatan	Jumlah UMKM
1.	Semarang Tengah	2.100
2.	Semarang Utara	1.750
3.	Semarang Timur	1.676
4.	Semarang Selatan	1.950
5.	Semarang Barat	2.311
6.	Gayamsari	1.450
7.	Genuk	1.934
8.	Pedurungan	2.500
9.	Tembalang	3.100
10.	Banyumanik	2.850
11.	Gunungpati	2.200
12.	Ngaliyan	2.467
13.	Mijen	1.325
14.	Tugu	1.100
TOTAL		28.713

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kot Semarang

Sedangkan, UMKM berbasis rumah di Kota Semarang tahun 2022 sejumlah 28.713 usaha dari hasil data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. UMKM berbasis rumah di Kota Semarang mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan teknologi digital dan platform

e-commerce. Banyak pelaku usaha yang memilih menjalankan bisnis dari rumah untuk mengurangi biaya operasional. Sektor Usaha yang mendominasi UMKM berbasis rumah di Semarang didominasi oleh usaha kuliner, fashion, kerajinan tangan, serta jasa seperti laundry dan pembuatan kue. Sektor kuliner menjadi yang terbesar karena permintaan pasar yang terus meningkat. Kecamatan Tembalang memiliki jumlah UMKM berbasis rumah tertinggi 3.100, karena banyaknya permukiman dan mahasiswa yang menciptakan ekosistem bisnis yang berkembang. Kecamatan Banyumanik dan Pedurungan juga memiliki jumlah UMKM yang tinggi karena kepadatan penduduk serta aksesibilitasnya yang baik.

Peningkatan potensi dalam mendukung pembangunan ekonomi tidak hanya dilihat dari kuantitas tetapi juga kualitas terkait dengan kinerja dan perkembangan usaha mereka. Selain permasalahan modal usaha seperti yang dialami pelaku usaha pada umumnya, karakteristik yang dimiliki oleh usaha berbasis rumah di Kota Semarang diantaranya adalah sebagian besar memiliki jangkuan pemasaran yang tidak luas yaitu sekitar lingkungan tempat tinggal. Hal ini berakibat pada keterbatasan kegiatan usaha dalam mendukung kegiatan ekonomi Kota Semarang. Hal ini akan berpengaruh pada kinerja kegiatan UMKM berbasis rumah dalam menyerap dan secara produktif memanfaatkan tenaga kerja maupun peningkatan kemakmuran pelaku usaha, sehingga secara keseluruhan hal ini cenderung melemahkan kemampuan dan kontribusi UMKM berbasis rumah terhadap pembangunan ekonomi di Kota Semarang. Namun demikian, kegiatan usaha ini tetap mendukung dalam menggerakkan

kegiatan ekonomi daerah dan mempunyai potensi untuk dikembangkan di Kota Semarang (Prawirosentono, 2007 :20)

1.2 Rumusan Masalah

Pada dasarnya usaha industri dilakukan untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya, namun pengusaha harus memperhatikan besarnya biaya yang dikeluarkan, keuntungan, dan tingkat efisiensinya. Berdasarkan uraian tersebut permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran pemerintah dalam pengembangan UMKM di Kota Semarang dalam peningkatan ekonomi masyarakat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitusebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bagaimana peran pemerintah dalam pengembangan UMKM di Kota Semarang dalam peningkatan ekonomi masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan menjadi bahan acuan untuk sebagai berikut :

1. Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan serta memperluas wawasan ilmu mengenai kewirausahaan, dan mendorong komunitas UMKM di Kota Semarang untuk menerapkan pengolahan makanan dengan baik.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk pemerintah dan lembaga yang berwenang secara langsung terhadap pengembangan sekaligus pembinaan terhadap setiap UMKM di Kota Semarang, sehingga dapat dijadikan referensi untuk perkembangan industrialisasi sesuai dengan harapan masyarakat dan para pengusaha kecil dan menengah.

1.5 Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka penelitian sebelumnya sangat berguna bagi perbandingan dan referensi serta memberikan gambaran tentang hasil penelitian terdahulu tentang peran pemerintah dalam menanggulangi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar suatu penelitian dapat dilakukan, harus ada temuan kunci dari hasil penelitian terdahulu untuk dimanfaatkan sebagai perbandingan dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, jumlah penelitian sebelumnya dijelaskan pada bagian rencana penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan Sri Sugianti Tahun 2019 yang berjudul Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan Di Pusat Oleh-Oleh Mak Denok Desa Serdang Jaya Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Latar belakang dari penelitian ini adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Adanya penelitian ini untuk memahami bagaimana UMKM khususnya di Pusat Oleh-

Oleh Mak Denok berkontribusi terhadap kesejahteraan karyawan yang bekerja di sana dengan manajemen yang minim dengan modal yang kecil, namun kini mnenjadi sangat pesat karena mendapat antusias yang terlalu besar dari masyarakat, sehingga bisa sejahtera dengan bantuan UMKM Mak Denok di tahun kedepannya. Penelitian ini melihat UMKM bukan hanya sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai agen sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya. Lokasi penelitian ini di Desa Serdang Jaya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, alasan penulis memilih Lokasi ini karena peran penting UMKM dalam mendukung perekonomian lokal dan meningkatkan taraf hidup melalui pusat oleh-oleh.

Metode penelitian yang diambil yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami peran UMKM dalam mensejahterakan karyawan. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan karyawan, pemilik UMKM, serta observasi langsung di lapangan. Kesamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak di *well-being*, yang memberikan kesukaan yang baik, syarat insan di mana orang berkembang. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah penelitian sebelumnya hanya terfokus di kajian ekonomi Islam sedangkan penelitian ini serius di kajian ilmiah dan kajian perspektif ekonomi Islam.

Hasil pembahasan dari penelitian ini yakni penulis

menemukan bahwa UMKM di Pusat Oleh-Oleh Mak Denok memiliki peran signifikan dalam mensejahterakan karyawan. Ini bisa berupa peningkatan pendapatan, stabilitas pekerjaan, dan dukungan sosial dari tempat kerja. Eksistensi UMKM sangat berperan penting dan UMKM menyampaikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi warga sekitar yang berujung pada kesejahteraan. Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan seperti keterbatasan modal, fluktuasi permintaan, atau kurangnya dukungan eksternal.

Rekomendasi yang diambil dari penelitian ini yaitu penulis merekomendasi peningkatan dukungan dari pemerintah, seperti penyediaan akses modal yang lebih mudah, pelatihan bisnis, asuransi Kesehatan, dan penyediaan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pertumbuhan usaha. Rekomendasi lainnya seperti peningkatan kapasitas produksi dan inovasi produk untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing UMKM di pasar. Selain itu, kolaborasi dengan Lembaga keuangan untuk menyediakan layanan keuangan yang ramah UMKM seperti pinjaman berbunga rendah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Nurmayanti Tahun 2021 yang berjudul Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ekonomi Syariah (Studi Kasus Rumah Makan Boneka).

Latar belakang dari penelitian ini adalah pentingnya peran UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam konteks ekonomi syariah. UMKM seringkali menjadi tulang punggung perekonomian di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis ingin menelaah bagaimana UMKM Rumah Makan Boneka berkontribusi dalam kesejahteraan masyarakat setempat berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Ekonomi syariah sendiri menekankan pada keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam kegiatan ekonomi, yang diharapkan dapat memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Fenomena yang dikaji pada penelitian ini adalah bahwa keberadaan industri rumahan kecil ini dikaitkan dengan gaji yang cukup tinggi, sehingga dengan gaji tersebut hasil usaha dapat meningkat dan dapat mendatangkan kemakmuran atau kekayaan masyarakat.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif di mana data yang diperoleh diolah dan dianalisis untuk memahami pola dan kontribusi UMKM terhadap kesejahteraan masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pemilik usaha, karyawan, serta pelanggan Rumah Makan Boneka untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai dampak ekonomi syariah yang diterapkan. Kesamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini ialah investasi yang sama dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, mengingat kedepannya, perekonomian masyarakat harus lebih baik dari sebelumnya. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu kepada penelitian ini ialah pada penelitian terdahulu menggunakan peran industri rumah tangga, sedangkan dengan penelitian ini digunakan peran UMKM sebagai bahan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rumah Makan Boneka sebagai salah satu UMKM yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Usaha ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi pemilik dan karyawan melainkan juga kontribusi terhadap perekonomian lokal melalui lapangan kerja dan peningkatan daya beli masyarakat. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip syariah seperti kejujuran, keadilan, dan kepedulian sosial dalam operasional usaha juga meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan, yang pada gilirannya memperkuat keberlanjutan usaha.

Rekomendasi dari penelitian ini adalah usaha ini diharapkan terus-menerus menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam operasionalnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan usaha. Selain itu, pelaku UMKM diharapkan untuk memperluas jangkauan usaha dan meningkatkan kualitas produk serta layanan guna menarik lebih banyak

pelanggan dan memperluas dampak positif terhadap masyarakat.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Multazam Nasruddin Tahun 2016 dengan judul Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Karyawan (Studi CV Citra Sari Kota Makassar).

Latar belakang penelitian ini adalah peran penting UMKM dalam perekonomian nasional, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga karyawan yang bekerja di sektor ini. UMKM Tcv Citra Sari dianggap sebagai pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dalam menyediakan peluang kerja bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana UMKM CV Citra Sari berkontribusi dalam peningkatan ekonomi keluarga serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhi peran tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen terkait operasional CV Citra Sari dan kondisi ekonomi keluarga. Wawancara dilakukan dengan pemilik usaha, manajemen, dan sejumlah karyawan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih rinci mengenai dampak pekerjaan mereka terhadap kesejahteraan keluarga. Data diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi pola-pola kontribusi UMKM terhadap ekonomi keluarga. Fenomena yang

diteliti ialah banyaknya pengangguran yang berdampak pada masyarakat sekitar terutama banyak keluarga pekerja yang menumbuhkan perekonomian sehingga UMKM Citra Sari membuka lowongan sehingga pengangguran berkurang untuk keluarga karyawan di CV Citra Sari.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV Citra Sari memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Pekerjaan disediakan oleh UMKM ini memungkinkan karyawan untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selain itu, di UMKM ini juga memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan keterampilan dan memperoleh pengalaman kerja yang berharga, yang pada gilirannya meningkatkan prospek mereka di pasar. Dampak positif ini tidak hanya dirasakan oleh karyawan secara individu, tetapi juga dirasakan oleh keluarga mereka yang mengalami peningkatan dalam taraf hidup dan stabilitas ekonomi.

Rekomendasi untuk penelitian ini adalah UMKM CV Citra Sari diharapkan untuk terus memperkuat perannya dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan dengan menyediakan gaji yang layak, tunjangan, dan peluang pengembangan keterampilan. Pemerintah dan kelembagaan perlu mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM melalui kebijakan yang ramah terhadap usaha kecil termasuk kemudahan akses terhadap pembiayaan dan

pelatihan. Karyawan UMKM disarankan untuk memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan guna meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar. Kesamaan dari penelitian terdahulu pada penelitian ini ialah sama berfokus kepada peningkatan ekonomi masyarakat saat ini. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada penelitian sebelumnya digunakan metode deskriptif kualitatif sedangkan pada penelitian ini digunakan metode penelitian deskriptif.

Dibandingkan dengan beberapa penelitian yang rata-rata hampir serupa dengan yang dilakukan peneliti, yakni mengenai peran pemerintah daerah maupun peningkatan atau pengembangan suatu usaha. Pada penelitian ini akan meneliti “Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Berbasis Rumah (*Home Base Enterprises*) Di Kota Semarang Tahun 2022” judul ini mengarah kepada bagaimana peranan pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk meningkatkan UMKM berbasis rumah di sektor kuliner. Penelitian ini memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi kebijakan, program, dan inisiatif pemerintah yang spesifik serta bagaimana mereka mempengaruhi UMKM berbasis rumah. Fokus yang membedakannya yaitu karena UMKM berbasis rumah memiliki tantangan dan potensi yang berbeda, seperti keterbatasan ruang, akses modal dan dukungan

infrastruktur. Penelitian ini belum pernah dilakukan penelitian oleh peneliti yang lain, dikarenakan berbeda tempat penelitiannya dan objeknya. Kebaruan penelitian yang ditulis ini mengambil daerah Tembalang dan Semarang Selatan untuk dilakukan penelitian, dengan objeknya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang mengenai peran pemerintah dalam meningkatkan UMKM. Untuk peran pemerintah mengenai peningkatan UMKM khususnya di daerah Tembalang dan Semarang Selatan belum ada yang melakukan penelitian serta belum diketahui seperti apa pada tahun 2022, sedangkan untuk waktu penelitian ini diambil pada tahun 2024. Kebaruan dalam penelitian ini pemerintah sebagai pemegang kekuasaan mengadakan program promosi melalui festival, pameran produk, bazaar atau event budaya bisa menjadi sarana untuk mempromosikan UMKM di kawasan ini. Pemerintah juga dapat mendorong UMKM untuk memanfaatkan platform online dan media sosial untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Pemerintah berusaha untuk meningkatkan kualitas produk dari masing-masing usaha untuk dapat bersaing di pasar melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas pada keterampilan teknis dan kewirausahaan untuk produk lokal.

1.6 Kerangka Teori

A. Peran Pemerintah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro

Kecil dan Menengah (UMKM)

Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai

peranan penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern. Peranan usaha kecil tersebut menjadi bagian yang utama dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh dua departemen, yaitu Departemen perindustrian dan perdagangan serta Departemen koperasi dan UMKM. Pelaksanaan kebijaksanaan UMKM oleh pemerintah selama orde baru tidak banyak dilaksanakan, lebih banyak hanya sembyan saja sehingga hasilnya tidak memuaskan. Pemerintah lebih memihak pada pengusaha besar hampir semua sektor. Pemerintah dalam perannya meningkatkan perekonomian daerah maupun nasional, salah satunya dengan cara meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah karena dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Berikut peran pemerintah dalam meningkatkan perekonomian di Kota Semarang :

1. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Pemerintah harus menyediakan berbagai fasilitas dan jalan yang ditempuh bagi UMKM agar dapat mencapai target yang dituju. Fasilitas yang dapat disediakan pemerintah dapat berupa pelatihan, pemberian bantuan, atau berupa subsidi barang maupun jasa. Pemerintah Daerah yang memiliki peran selaku fasilitator harus mampu memberikan berbagai bantuan modal kepada para pelaku UMKM. Peran Pemerintah selaku fasilitator menjadi sebuah hal yang penting dalam pengembangan suatu UMKM. Sudah ada dana bantuan modal usaha berupa pinjaman atau kredit usaha rakyat yang biasa disebut (KUR) kepada pelaku UMKM,

namun masih ada pelaku UMKM yang belum mengetahui hal tersebut sehingga belum bisa memanfaatkan fasilitas tersebut.

2. Peran Pemerintah Sebagai Inovator

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagai innovator berusaha untuk menciptakan suatu hal baru untuk pelaku UMKM agar dapat semakin maju dan berkembang dalam segala aspek. Salah satu hal yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah dengan menciptakan akses atau system baru untuk meningkatkan penjualan para pelaku UMKM. Akses tersebut diberi nama Sistem Informasi Usaha Mikro (SI UMI). SI UMI ialah aplikasi berbasis mobile yang menghubungkan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Semarang dengan para konsumen. Hingga saat ini, penjualan produk pelaku UMKM di aplikasi SI UMI sudah memperlihatkan hasil yang maksimal. Dengan adanya inovasi SI UMI ini, para pelaku UMKM sangat senang dan terbantu dikarenakan penjualannya semakin meningkat, otomatis dengan penjualan yang semakin meningkat maka penghasilan yang dihasilkan oleh pelaku UMKM di Kota Semarang juga meningkat.

3. Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Peran pemerintah membuat regulator yaitu membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Sebagai regulator, pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan usaha agar tetap kondusif untuk melakukan investigasi yang dilakukan dengan mengatur Suku Bunga Bank Indonesia dan membuat kebijakan mengenai aturan persaingan usaha. Pemerintah merupakan pihak yang mampu menetapkan aturan

agar kehidupan berjalannya baik dan dinamis. Dalam hal ini, pembagian wewenang dibagi menjadi dua yaitu wewenang pemerintah pusat dan wewenang pemerintah daerah. Keduanya memiliki wewenang sendiri-sendiri untuk mengatur masyarakat yang di daerah masing-masing.

B. Jenis-jenis dan Manfaat UMKM.

Pada Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah, sebagai berikut :

A. Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Penjualan atau omzet dari usaha mikro dalam setahun paling banyak Rp. 300 juta dan jumlah aset bisnisnya maksimal Rp. 50 juta (di luar aset tanah dan bangunan). Contohnya seperti Ayam Goreng Gerobak, warung-warung makanan ringan, usaha pempek rumahan, kedai kopi, dan sebagainya.

B. Usaha Kecil

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang yang dimiliki, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yang dimaksud dalam Undang-Undang. UMKM kategori usaha kecil yakni memiliki kekayaan bersih antara Rp. 50 juta sampai dengan Rp.

500 juta, lalu penjualan per tahun antara Rp. 300 juta sampai Rp. 2,5 miliar. Contohnya seperti usaha *laundry*, restoran kecil, bengkel motor, katering, usaha fotocopy, dan sebagainya.

C. Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Kekayaan bersih usaha menengah di luar tanah dan bangunan sudah mencapai di atas Rp. 500 juta per tahun. Usaha menengah juga memiliki kriteria omzet penjualan sebesar lebih dari Rp. 2,5 miliar sampai Rp. 50 miliar per tahun. Selain perorangan keuangan yang sudah terpisah, usaha menengah juga sudah memiliki legalitas. Contohnya seperti mini market, restoran besar, hingga toko bangunan. Salah satu manfaat dari kewirausahaan sosial adalah untuk membangun sebuah bisnis sebagai solusi untuk permasalahan sosial ekonomi, pendidikan, lingkungan dan berbagai permasalahan yang telah menjadi tantangan dunia. Berikut adalah manfaat UMKM dalam perekonomian negara :

- a. Menciptakan lapangan kerja.
- b. Mengurangi pengangguran.
- c. Meningkatkan pendapatan masyarakat.

- d. Mengombinasi faktor-faktor produksi (alam, tenaga kerja, modal dan keahlian)
- e. Meningkatkan produktivitas nasional.

C. Karakteristik UMKM Home Base Enterprises

Melimpahnya UMKM di Indonesia masih diliputi tingkat formalitas yang rendah. Dengan kata lain, UMKM di Indonesia tergolong sektor informal atau ekonomi bayangan yang belum dapat terekam perkembangan ekonominya. Salah satu indikator yang dapat mengukur tingkat formalitas tersebut adalah pembiayaan lembaga keuangan formal. Berdasarkan penjelasan dari Menteri Koperasi dan UKM pada tahun 2020, setidaknya terdapat 23 juta UMKM yang belum mendapatkan pembiayaan perbankan. Pada kondisi ini, Upaya formalitas industri UMKM melalui pembiayaan inklusif tergolong rendah. Pada pasar tenaga kerja yang dikemukakan Badan Pusat Statistik (BPS) karakteristik menjadi 2 (dua) jenis yaitu informal dan formal. Pekerjaan sektor formal dan informal menjadi di bedakan dengan melihat status pekerjaan yang sudah ditetapkan BPS. BPS menjabarkan bahwa terdapat terdapat 8 (delapan) status pekerjaan yaitu berusaha sendiri, berusaha sendiri dengan karyawan tetap, buruh atau karyawan pemerintah, buruh atau karyawan swasta, berusaha sendiri dengan bantuan karyawan tidak tetap, pekerjaan bebas di sektor pertanian, pekerjaan bebas di sektor non-pertanian, dan pekerjaan keluarga.

UMKM Home Base informal adalah usaha sub-sektor ekonomi yang memiliki keterbatasan modal, keterbatasan sumber daya, dan

keterbatasan infrastruktur. Dengan kata lain, UMKM informal tidak memiliki catatan resmi dari pemerintah sehingga usaha ini seringkali terkena razia. UMKM informal sering kita jumpai di acara yang diselenggarakan pemerintah seperti Bazaar, Car Free Day, merayakan Hari nasional, dan lain-lain. Hal ini bertujuan untuk memeriahkan acara tersebut agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam acara yang diselenggarakan. UMKM informal termasuk dalam usaha kecil dimana usaha ini dilakukan oleh beberapa orang saja dan memiliki kapasitas yang kecil. Contoh UMKM informal seperti penjualan sate, penjualan baju atau Thrift, penjualan minuman segar, penjualan makanan ringan, dan masih banyak lagi. Meskipun terlihat lebih mudah dilakukan daripada UMKM Home Made formal, UMKM informal juga memiliki kendala dalam proses pelaksanaannya keterbatasan modal, keterbatasan akses pasar dimana

UMKM Home Base informal adalah usaha sub-sektor ekonomi yang memiliki keterbatasan modal, keterbatasan sumber daya, dan keterbatasan infrastruktur. Dengan kata lain, UMKM informal tidak memiliki catatan resmi dari pemerintah sehingga usaha ini seringkali terkena razia. UMKM informal sering kita jumpai di acara yang diselenggarakan pemerintah seperti Bazaar, Car Free Day, merayakan Hari nasional, dan lain-lain. Hal ini bertujuan untuk memeriahkan acara tersebut agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam acara yang diselenggarakan. UMKM informal termasuk dalam usaha kecil dimana usaha ini dilakukan oleh beberapa orang saja dan memiliki kapasitas yang kecil. Contoh UMKM informal seperti penjualan sate, penjualan baju atau Thrift,

penjualan minuman segar, penjualan makanan ringan, dan masih banyak lagi. Meskipun terlihat lebih mudah dilakukan daripada UMKM Home Made formal, UMKM informal juga memiliki kendala dalam proses pelaksanaannya keterbatasan modal, keterbatasan akses pasar dimana UMKM informal ini menggunakan menggunakan sistem “siapa cepat dia dapat” serta letak yang kurang strategis. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2008, UMKM informal meliputi usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp 500.000.000,00 dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan UMKM setiap tahunnya paling banyak Rp 300.000.000,00.

UMKM Home Base formal adalah usaha sub-ekonomi yang bergerak secara resmi dari pemerintah dan dapat dijadikan sebagai ciri khas dan pusat oleh-oleh. Usaha ini biasanya diproduksi oleh jumlah karyawan yang cukup banyak kurang lebih 20 orang dan memiliki pabrik atau tempat tersendiri untuk proses usaha tersebut. UMKM ini biasanya terdapat pada produk-produk besar yang sudah terkenal dan ternama yang memiliki strategi pemasaran yang cukup luas. Usaha ini tentu saja membutuhkan modal dan sumber daya yang besar untuk menjadikan produk tersebut berkembang. UMKM formal sangatlah membantu dalam pengembangan tingkat ekonomi di Indonesia karena dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang luas untuk masyarakat yang kesusahan dalam mendapatkan pekerjaan. UMKM formal cenderung lebih sulit dalam mengelola proses pengembangan produknya karena jenis usaha ini merupakan salah satu asset besar negara Indonesia untuk meningkatkan

perekonomian Indonesia dimana usaha ini harus terus berkembang dan berjalan. Dengan demikian, sebagai pengusaha yang memiliki usaha formal ini harus memiliki pemikiran yang maju dan kritis agar bisa meningkatkan usaha tersebut. Contoh UMKM Home Made yang beroperasi formal adalah bengkel motor berizin, took online dengan npwp, pusatkecantikan yang terdaftar, galeri seni yang berizin, dan masih banyak lagi. UMKM formal ini biasanya kita jumpai di pusat kota atau di Ibu kota besar yang terdapat di took-toko dipinggir jalan. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2008 UMKM ini memiliki kekayaan bersih mencapai Rp. 300.000.000,00 dan tidak termasuk bangunan dan tempat usaha. Hasil penjualan UMKM setiap tahunnya paling banyak 10 Miliar.

D. Pembinaan UMKM

Menurut Asy'arie (1994) adapun program pembinaan UMKM yang dapat dilakukan dengan beberapa tahapan kegiatan antara lain :

- 1) Pelatihan Usaha Melalui pelatihan ini, setiap pelaku UMKM diberikan pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan, dengan berbagai macam seluk beluk permasalahan yang ada didalamnya.
- 2) Pendampingan Pada tahap ini, yaitu ketika usaha dijalankan maka pelaku UMKM akan didampingi oleh tenaga pendamping yang sudah profesional, yang berfungsi sebagai pengarah maupun pembimbing, sehingga usaha yang dijalankan mampu berhasil digelutinya, dan benar benar mampu dikuasainya, memungkinkan diadakan usaha-usaha pengembangan.

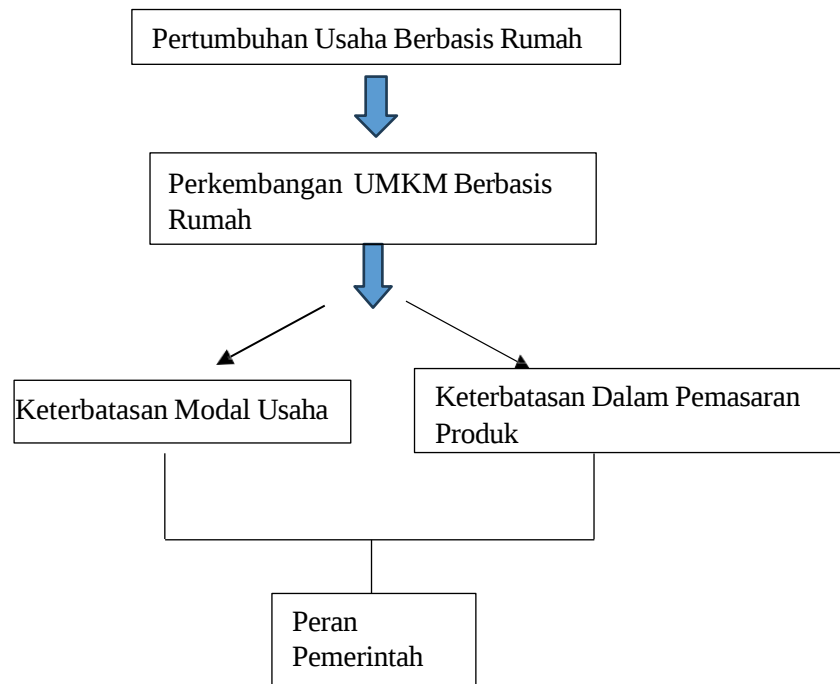
Jaringan Bisnis Dengan melalui berbagai tahapan pembinaan yang konsisten, sistematis dan berkelanjutan, rasanya untuk melanjutkan wirausaha yang sejati, permasalahan hanya soal waktu saja. Semua orang pada dasarnya dapat menjadi wirausaha, dan semakin banyak warga menjadi wirausaha, maka ketahanan suatu bangsa akan memperoleh dasar pijakan yang kokoh.

1.7 Operasional Konsep

Kerangka pikir dalam penelitian ini diawali dari latar belakang yaitu sebagian kegiatan usaha berawal dari rumah yang kemudian terus berkembang sehingga UMKM berbasis rumah turut mendorong perkembangan perekonomian rakyat dan berpotensi terhadap pembangunan ekonomi. Dalam mendukung perekonomian Kota Semarang, permasalahan yang dihadapi adalah keterbatasan kegiatan usaha dalam mendukung perekonomian Kota Semarang sehingga dapat melemahkan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi. Pertanyaan penelitian yang muncul dari permasalahan tersebut adalah bagaimana kontribusi UMKM berbasis rumah terhadap pembangunan ekonomi Kota Semarang. Kemudian untuk menjawab pertanyaan tersebut dilakukan analisis kinerja pembangunan ekonomi Kota Semarang, analisis kontribusi UMKM berbasis rumah terhadap aspek ketenagakerjaan, kemiskinan, dan distribusi pendapatan. Hasil akhir dari Tugas Akhir ini berupa kesimpulan dan rekomendasi terkait dengan kontribusi UMKM berbasis rumah terhadap pembangunan ekonomi Kota Semarang.

Tabel 1. 3

Kerangka Berpikir



Menurut Sugiyono, operasional konsep adalah seperangkat petunjuk yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan mengukur suatu variabel atau konsep untuk menguji kesempurnaan. Definisi operasional variabel ditemukan item-item yang dituangkan dalam instrument penelitian. Peran pemerintah terdiri dari peran pengaturan (regulasi), peran pemberdayaan, dan peran pelayanan. Upaya yang dimaksud dari dampak peran pemerintah ini yaitu bagaimana dalam meningkatkan UMKM. UMKM sendiri memiliki potensi karena merupakan ciri khas dari Kota Semarang. Adapun peran pemerintah sebagai fasilitator, peran pemerintah sebagai inovator dan pemerintah sebagai regulator.

1.7.1 Definisi Konseptual

A. Peran

Peran adalah serangkaian fungsi, tugas, atau tanggung jawab yang dijalankan oleh individu, kelompok, atau institusi dalam suatu sistem sosial untuk mencapai tujuan tertentu. Peran dapat bersifat formal maupun informal, tergantung pada konteksnya. Dalam organisasi atau pemerintahan, peran biasanya ditentukan oleh kebijakan, regulasi, serta ekspektasi masyarakat terhadap pihak yang bersangkutan. Dalam konteks pemerintahan, peran merujuk pada upaya yang dilakukan oleh lembaga negara dalam menjalankan kewajibannya, seperti penyusunan kebijakan, pengawasan, fasilitasi, serta pemberian dukungan kepada masyarakat. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan regulasi yang kondusif, memberikan bantuan finansial, serta menyediakan infrastruktur untuk mendukung berbagai sektor, termasuk ekonomi dan UMKM.

B. Peran Pemerintah

Peran pemerintah merujuk pada fungsi, tugas, dan tanggung jawab yang dijalankan oleh lembaga negara dalam mengatur, mengelola, dan mengembangkan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Peran ini mencakup pembuatan kebijakan, penyediaan layanan publik, pengawasan terhadap aktivitas ekonomi dan sosial, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Peran pemerintah merujuk pada keterlibatan aktif dari lembaga negara dalam penyusunan kebijakan, regulasi, serta pemberian dukungan kepada masyarakat dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi

dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Peran ini dapat berupa bantuan finansial, fasilitasi perizinan, pelatihan, serta penyediaan infrastruktur pendukung. (Sumber: Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM). Pemerintah Kota Semarang telah menjalankan berbagai kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa keberhasilan yang dapat diidentifikasi antara lain dukungan terhadap UMKM, peningkatan infrastruktur, akses permodalan bagi UMKM, peningkatan daya saing, serta pertumbuhan ekonomi Kota Semarang.

C. UMKM Home base Enterprises

UMKM berbasis rumah adalah jenis usaha yang dijalankan dari rumah atau tempat tinggal pemiliknya tanpa memerlukan lokasi usaha yang terpisah. Usaha ini biasanya memiliki modal yang relatif kecil, tenaga kerja terbatas, dan memanfaatkan sumber daya lokal serta teknologi sederhana. Contoh UMKM berbasis rumah termasuk industri makanan rumahan, kerajinan tangan, dan jasa berbasis rumah seperti laundry dan katering. Pemerintah Kota Semarang telah memberikan berbagai bentuk dukungan bagi UMKM berbasis rumah, seperti **Pelatihan dan Pendampingan**, Program pelatihan kewirausahaan, pemasaran digital, serta pengelolaan keuangan bagi pelaku UMKM. **Kemudahan Perizinan:** Penerapan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS) untuk memudahkan legalitas usaha kecil. **Akses Permodalan:** Bantuan modal usaha melalui kredit usaha rakyat (KUR), koperasi, serta program bantuan dari Dinas Koperasi dan UMKM.

Digitalisasi dan Pemasaran: Fasilitasi masuk ke platform e-commerce serta promosi melalui program *Semarang Smart City* yang membantu UMKM menjangkau pasar lebih luas.

D. Peran Pemerintah Terhadap Pengembangan UMKM Home Base Enterprises

Peran pemerintah dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian banyak negara termasuk Indonesia karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah dalam menjalankan fungsinya berdasarkan Owen E Hughes (1994) paling tidak pemerintah mempunyai tiga peran, antara lain :

A. Sebagai Fasilitator

- 1. Penyediaan Infrastruktur dan Fasilitas.** Pemerintah harus menyediakan infrastruktur dasar seperti pasar, pusat bisnis dan akses teknologi informasi untuk mendukung perkembangan UMKM. Pemerintah juga memfasilitasi pelatihan yang berkelanjutan agar UMKM mampu beradaptasi dengan perubahan pasar.
- 2. Akses ke Pembiayaan.** Mendirikan Lembaga keuangan mikro atau memberikan bunga untuk membantu UMKM memperoleh modal.

B. Sebagai Inovator

- 1. Pengembangan produk.** Pemerintah perlu mendorong inovasi

produk melalui kolaborasi dengan universitas dan Lembaga riset. Pemerintah bisa berperan dalam menyediakan dana riset dan pengembangan untuk produk-produk.

2. **Digitalisasi dan Teknologi.** Pemerintah berperan sebagai katalis dalam pengenalan dan penerapan teknologi baru untuk UMKM termasuk e-commerce dan pemasaran digital.

C. Sebagai Regulator

1. **Penyederhanaan Regulasi.** regulasi yang lebih sederhana dan ramah terhadap UMKM, termasuk kemudahan dalam perizinan dan pengurangan beban pajak.
2. **Standarisasi dan Sertifikasi.** Pemerintah memastikan bahwa UMKM memenuhi standar kualitas produk yang dapat bersaing di pasar global. Pemerintah dapat memberikan dukungan dalam proses sertifikasi produk.
3. **Pengawasan dan Kepatuhan.** Pengawasan yang efektif dari pemerintah diperlukan untuk memastikan bahwa UMKM beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan kesehatan, keamanan, dan lingkungan.

1.8 Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Karena topik penelitian ini sering kali sangat kontekstual, bergantung pada lokasi, kebijakan dan kondisi sosial-ekonomi tertentu. Metode deskriptif kualitatif membantu menyoroti

bagaimana faktor-faktor ini berinteraksi dalam konteks spesifik di Kota Semarang. Metode ini juga lebih efektif untuk menggambarkan interaksi sosial dan kultural yang mempengaruhi peran pemerintah dan perkembangan UMKM di Kota Semarang yang mungkin sulit diukur secara kuantitatif.

Penelitian kualitatif mempunyai arah untuk memberikan pemahaman terhadap kejadian mengenai sesuatu yang dialami oleh subjek penelitian, seperti motivasi, persepsi tindakan, perilaku dan lainnya. Sedangkan jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis yang hanya melukis, menjelaskan, serta memberikan pelapor kondisi suatu objek ataupun suatu adanya fakta peristiwa serta berwujud pengungkapan fakta (Subarsimi, 2006:239)

A. Lokasi Penelitian

Sesuai pada judul penelitian ini, yakni berlokasi di Pemerintah Kota Semarang, di Jalan Tugu Muda, Jawa Tengah

B. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini, subjek penelitian atau informan yang terlibat untuk pemecahan masalah yang diteliti yaitu :

1. Pelaku UMKM Berbasis Rumah. Beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam pemilihan subjek ini antaranya pemilik usaha yang menjalankan bisnis dari rumah (misalnya usaha kuliner rumahan, kerajinan tangan, jasa jahit, dan lain-lain), serta UMKM yang telah mendapatkan dukungan atau program pemerintah serta yang belum mendapatkan bantuan pemerintah.

2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, yang bertanggung jawab dalam pembinaan, pelatihan, pendampingan, serta pemasaran UMKM.

C. Teknik Pengumpulan

Data Pengumpulan data pada penelitian kualitatif jenis ini berakibat peneliti menjadi alat primer buat mencari berita melalui hubungan simbolik menggunakan informan atau subjek yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan peneliti ialah

a) Observasi

Observasi adalah cara mengumpulkan data yang membutuhkan peneliti lapangan mendalami sesuatu yang terkait pada tulang, tempat, pelaku, tindakan, waktu, kejadian, keinginan, dan emosi. Peneliti melakukan observasi pada lokasi penelitian sebagai mengumpulkan data serta menulis masalah yang terjadi fokus masalah yang berkaitan pada awal kajian peneliti.

b) Wawancara (interview)

Interview merupakan aktivitas omongan yang mempunyai maksud lain serta dilangsungkan pada dua belah pihak, ialah pewawancara serta yang dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi, opini lisan dari orang yang sering disebut sebagai narasumber. Kegiatan penelitian ini dilangsungkan dengan mengajukan salah satu tanda tanya terhadap informan yang berkaitan pada pertanyaan serta fokus kajian. Kajian ini mempergunakan interview diri terstruktur, yaitu peneliti sudah mengembangkan petunjuk untuk memandu wawancara, tetapi wawancara

tidak sepenuhnya terkait dengan panduan serta cukup umum. Acuan wawancara dipergunakan agar menjauhi masalah yang terlewatkan oleh peneliti serta berfungsi sebagai panduan untuk memandu dan menyusun proses wawancara.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman tindakan masa lalu yang diungkapkan secara lisan, tertulis, dan dalam bentuk. Dokumen tersebut biasanya berupa foto, video, catatan, surat, buku harian dan segala macam informasi tambahan yang sumber utamanya adalah observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah catatan peristiwa masa lalu. Dokumen bisa berbentuk catatan, gambar atau karya monumental manusia. Berikut yang mau digambarkan oleh peneliti meliputi:

- 1) Alur interview bersama informan
- 2) Struktur pengurus UKM
- 3) Hasil dari produk UMKM
- 4) Alat dan bahan yang digunakan untuk bekerja

d) Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh berasal akibat observasi, wawancara, serta dokumentasi menggunakan cara mengorganisasikan data ke pada kategori, menjabarkan ke pada unit unit, menyusun ke pada pola, menentukan mana yang krusial serta yang akan dipelajari, serta membentuk kesimpulan sebagai akibatnya simpel dipahami oleh dia sendiri gugusan orang lain. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknis analisis deskriptif yaitu

cara analisis yang cenderung memakai kata-istilah atau narasi buat menyebutkan kenyataan atau data yang diperoleh.

e) Kualitas Penelitian Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi lapangan. Untuk memastikan validitas data yang dikumpulkan, penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Triangulasi merupakan Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian dengan data lainnya. Triangulasi dilakukan untuk memeriksakonsistensi data dari berbagai sumber, metode, dan perspektif. Dalam penelitian ini, triangulasi digunakan untuk meningkatkan validitas data. Peneliti menggunakan triangulasi data, metode, dan teori. Triangulasi data melibatkan wawancara dengan pelaku UMKM dan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab serta analisis dokumen kebijakan. Triangulasi metode dilakukan dengan menggabungkan wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Selain itu, triangulasi teori digunakan untuk menggabungkan teori pemberdayaan ekonomi dan teori kebijakan publik untuk menganalisis peran pemerintah dalam pengembangan UMKM. Dengan penerapan triangulasi, diharapkan hasil penelitian lebih valid dan komprehensi